BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Integrasi Ekonomi dan Politik

Integrasi ekonomi antarnegara dalam suatu kawasan mengasumsikan hubungan yang erat antara integrasi ekonomi dan integrasi politik (Panic, 1998 : 30). Karena dalam konteks integrasi ekonomi, koordinasi kebijakan ekonomi memerlukan keputusan politik di antara negara yang berpartisipasi. Para pemimpin ASEAN telah mendeklarasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai tujuan akhir dari integrasi ekonomi regional ASEAN. Bentuk komitmen tersebut **ASEAN** anggota setuju mengimplementasikan MEA pada tahun 2015 dan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi serta menciptakan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang kompetitif, berdaya saing tinggi, dan terintegrasi penuh, dalam ekonomi global. Namun dalam kondisi ini, tentu terdapat pertanyaan bagaimana Indonesia khususnya Daerah Kabupaten Garut dapat mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut ?. Dengan memaksimalkan peran dari pemerintah daerah, sebagai salah satu penghubung antara politik dan ekonomi. Budiardjo: 15, bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat di terima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.

Lele, Gabriel dkk : 29, Globalisasi adalah sebuah proyek politik global. Pendekatan ini percaya bahwa globalisasi adalah sebuah proyek politik yang di dorong oleh sebuah institusi kepengaturan global dan melibatkan

kepentingan negara juga di dalamnya. Pendekatan ini percaya bahwa dalam lanskap politik global yang semakin terintegrasi, negara sangat penting untuk meregulasi pasar dan memberdayakan sumber daya yang ada di dalamnya. Negara sebagai regulator untuk menyiapkan proses ekonomi termasuk dalam integrasi ekonomi kawasan.

Jovanovic (2006),dalam Jurnal No.2. September 2019. mengemukakan secara umum integrasi ekonomi yaitu suatu proses yang mendorong beberapa Negara untuk dapat meningkatkan kemakmurannya terutama. United Nations Conference on Trade Development (UNCTAD) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Pelkman (2003) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai dua atau lebih ekonomi atau negara. Adapun hambatanhambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun relatif rendah. Solvatore (1997) menguraikan integrasi ekonomi atas beberapa bentuk:

- Pengaturan Perdagangan Preferensial (Prefential Trade Arragements)
 dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatanhambatan perdagangan diantara mereka dan membedakannya dengan
 negara-negara yang bukan anggota.
- 2. Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area) di mana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif di antara negara-

negara anggota dihilangkan sepenuhnya. Namun masing-masing negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan perdagangan yang diterapkan negara non anggota.

- 3. Persekutuan Pabeas (*Customs Union*) yaitu mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan diantara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan yang diterapkan negara lain non-anggota.
- 4. Pasaran Bersama (Common Market) yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan.
- 5. Uni Ekonomi (*Economic Union*) yaitu dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota di dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan.

Dalam hasil kajian Dollar (1992), dkk menunjukkan bahwa integrasi ekonomi yang menurunkan atau menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota, dapat meningkatkan daya saing dan membuka besarnya pasar pada negara anggota, dapat meningkatkan daya saing dan membuka besarnya pasar pada negara anggota, dapat meningkatkan persaingan industri domestik yang dapat memacu efisiensi produktif diantara produsen domestik dan meningkatkan kualitas dan kuantitas input dan barang dalam

perekonomian, produsen domestik dapat meningkatkan profit dengan semakin besarnya pasar ekspor dan meningkatkan kesempatan kerja.

B. Konsepsi Pembangunan Ekonomi Lokal

Blakey dan Bradshaw, (1990) dalam Dayat berpendapat bahwa Pembangunan Ekonomi lokal adalah dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan pekerjaan. Selanjutnya menurut A.H.J Helming dikutif dari Sri Wahyuni (2013) Pembangunan ekonomi lokal adalah proses dimana kemitraan yang mampan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Pemerintah Kabupaten Garut melalui perencanaannya telah berupaya untuk memberikan motivasi kepada pelaku usaha yaitu UMKM untuk mendorong agar tetap berinovasi dalam ekonomi lokal.

Bartik (2003) mengatakan pembangunan ekonomi lokal sebagai peningkatan dalam kapasitas ekonomi lokal untuk menciptakan kesejahteraan bagi penduduk lokal. Peningkatan dimaksud terjadi apabila sumber daya lokal seperti tenaga kerja dan lahan dimanfaatkan dengan lebih produktif. Pembangunan ekonomi juga terjadi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan lahan.

Rodriguez-Pose (2001) dalam Saragih : 58, mengidentifikasikan sejumlah keunggulan strategi pembangunan ekonomi lokal jika dibandingkan dengan program pembangunan tradisional. Keunggulan dimaksud dapat dirinci ke

dalam keunggulan sosial dan ekonomi. Keunggulan sosial meliputi : (1) strategi pembangunan ekonomi lokal memberdayakan masyarakat lokal dan mendorong adanya dialog lokal, dan (2) membantu menciptakan institusi lokal yang lebih transparan dan akuntabel yang berkontribusi pada pengembangan masyarakat sipil lokal. Sementara dari sisi ekonomi, keunggulan pendekatan PEL merupakan yang paling nyata : (1) karena strategi PEL melekatkan aktivitas ekonomi tergantung pada keunggulan komparatif dan kondisi ekonomi spesifik wilayah dan membuat aktivitas ekonomi spesifik wilayah, maka akan tercipta kesempatan kerja yang berkelanjutan dan lebih mampu bertahan dalam perubahan lingkungan ekonomi global, (2) sebagai akibat dari pelibatan para pemangku kepentingan lokal dan mengakar pada aktivitas ekonomi wilayah, strategi pembangunan ekonomi lokal juga berkontribusi untuk perbaikan kualitas pekerjaan.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal adalah menciptakan kondisi yang baik bagi berkembangnya wirausahawan dan meningkatnya pembangunan lokal. Peran pemerintah daerah bukan membentuk perusahaan baru, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yaitu menciptakan kondisi bagi bisnis lokal untuk dapat bertahan bahkan memperluas aktivitas mereka serta menarik investor dari luar wilayah. Dengan demikian untuk menggerakkan pembangunan ekonomi lokal perlu dilakukan lima tahapan: (1) pengorganisasian, (2) evaluasi strategi sebelumnya, (3) menyusun rencana strategi untuk pembangunan ekonomi lokal, (4)

menciptakan sistem pembangunan ekonomi lokal dan mengimplementasikan rencana strategi, (5) monitoring dan evaluasi.

Meskipun terutama strategi di bidang ekonomi, Pembangunan ekonomi lokal secara bersamaan berkepentingan untuk mencapai tujuan sosial yaitu pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial. Strategi pembangunan ekonomi lokal terdiri atas intervensi terpadu untuk : (1) memperbaiki daya saing perusahaan lokal, (2) merangsang masuknya investasi, (3) meningkatkan keahlian tenaga kerja, dan (4) meningkatkan infrastruktur lokal. Proses pembangunan ekonomi lokal mengikuti tahap : (1) memulai aktivitas dan membangun konsensus, (2) diagnosis teritori dan pemetaan kelembagaan, (3) menggerakkan forum lokal, (4) strategi pembangunan ekonomi lokal dan perencanaan aksi, (5) implementasi pelayanan dan intervensi pembangunan ekonomi lokal, dan (6) umpan balik, monitoring dan evaluasi keberkelanjutan intervensi pembangunan ekonomi lokal. Sementara unsur dasar dari pembangunan ekonomi lokal terdiri atas : (1) mobilisasi dan partisipasi aktoraktor lokal, (2) sikap proaktif pemerintah daerah, (3) keberadaan tim kepemimpinan lokal, (4) keberadaan tim kepemimpinan lokal, (4) kerja sama sektor publik dan swasta, (5) persiapan strategi pembangunan ekonomi lokal, (6) promosi usaha mikro-kecil-menengah dan pelatihan sumber daya manusia, (7) koordinasi promosi program dan instrumen, dan (8) industri pembangunan ekonomi lokal (Alburquerque 2004 dalam Saragih: 62).

Mudrajat 2004 : 120 dalam JAP vol. 1 No.4 mengemukakan, Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Selain itu, menurut munir, 2007 pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. (Dalam Etika dkk, akses 27 Desember 2020).

Blakey dalam Supriadi mengemukakan dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

- 1. Perluasan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha.
- 2. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.
- Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran.
- 4. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Dalam kaitannya dengan teori pertumbuhan ekonomi maka Krugman (1994) mengatakan bahwa investasi sumber daya manusia menjadi lebih penting peranannya dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas bagi negara sedang berkembang merupakan faktor penting dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara lain. Era informasi dan teknologi yang berkembang pesat membuktikan bahwa penguasaan teknologi yang baik akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan itu sendiri. Dalam konteks produksi maka adanya penguasaan teknologi yang baik, maka akan mendorong terjadinya inovasi teknologi. Inovasi teknologi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan penemuan produk-produk baru dan cara produksi yang lebih efisien Barro dalam Romer, 1994, h.36. (Dalam Etika dkk, akses 27 Desember 2020).

Rahma: 2012, Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah menjadi sangat berkepentingan untuk mampu menciptakan kondisi yang diidam-idamkan tersebut sehingga pembangunan ekonomi lokal menjadi pendekatan yang sangat relevan bagi kota dan kabupaten di Indonesia. Pengalaman penerapan konsep pembangunan ekonomi lokal di banyak negara termasuk di sejumlah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam merangsang prakarsa pembangunan ekonomi yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah banyak dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menjadi bahan referensi dan acuan untuk memperoleh penulisan yang lebih baik. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi sebagai berikut :

Pertama, Kajian Kebijakan dan Strategi Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh Chairul Saleh. Fakultas Ekonomi Universitas Jember Tahun 2016. Merupakan penelitian Deskriptif yang menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap MEA. Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan terhadap tenaga kerja lokal untuk tetap bisa bersaing dengan asing, dan di mulai dengan standarisasi kompetensi dan pemahaman bahasa dan budaya, sertifikasi yang objektif dan transfaran, persiapan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

Kemudian ia menjelaskan dalam menghadapi MEA, persoalan tenaga kerja di Luar Negeri masih banyak menyisakan pekerjaan rumah. Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar terkait dengan perlindungan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja Asia Tenggara lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggambarkan masyarakat ekonomi ASEAN, potensi lokal kabupaten di Jawa Timur, peta tenaga kerja, strategi dan kebijakan serta langkah-langkah yang bisa dilakukan pelaku dan pemerintah, faktor pendukung dan penghambat sehingga menjadi dasar pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dalam upaya melindungi tenaga kerja lokal menghadapi MEA. Lokasi penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan,

dan Kabupaten Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Adapun data primer yang dimaksud merupakan hasil survei dan peninjauan lapangan termasuk potret atau visualisasi potensi wilayah, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari data-data yang tersedia dari instansi yang terkait.

Kedua, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhadap Sektor Kerajinan Batik Melayu Riau Tahun 2014-2015 oleh Putri Tiara Kasih. Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini membahas tentang Provinsi Riau yang memiliki banyak pengusaha di bidang Usaha Miro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan jenis usaha yang memberi keuntungan yang banyak bagi pemerintah Provinsi Riau, karena sumbangannya kepada kas pemerintah daerah cukup besar. Menurut penulis kerjasama regional ekonomi **ASEAN** bagi para pelaku **UMKM** mendatangkan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Dalam penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif Neo Liberal pandangan Keynesian yang mencoba mendorong negara untuk lebih berperan dalam menciptakan perdamaian melalui campur tangannya untuk membuat hubungan antar negara terjadi dan munculah saling ketergantungan. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah melakukan intervensi guna mengatur perekonomian pasar bebas. UMKM di ASEAN merupakan tulang punggung

dari perekonomian ASEAN dan pengembangan UMKM merupakan bagian integral untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan, sementara bagi Indonesia, UMKM memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kerjasama regional ekonomi negara-negara ASEAN dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN bagi para pelaku UMKM mendatangkan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Untuk menjawab permasalahan tersebut pemerintah menyiapkan strategi dan kebijakan-kebijakan salah satunya dengan memperkuat UMKM.

Ketiga, Strategi Komunikasi Politik dalam Sosialisasi Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Bandung Barat. Oleh Benazir Bona Pratamawaty, Evie Ariadne, dan Putri Trulline. Mahasiswa Universitas Padjajaran, Bandung. Penelitian ini membahas perlunya pemerintah daerah melakukan sosialisasi MEA. Penelitian ini terfokus pada perlunya Kabupaten di Jawa Barat untuk mengeluarkan kebijakan komunikasi politik tertentu dalam rangka mensosialisasikan pemberlakuan MEA guna menyiapkan seluruh stakeholders terutama dalam masyarakat awam dalam menghadapi fase baru dalam tatanan ekonomi bangsa ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif di pandang relevan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, dimana peneliti mengkaji dan menganalisis secara mendalam kesiapan

serta strategi komunikasi politik pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyiapkan masyarakatnya menghadapi MEA.

Keempat, Strategi dan Langkah-Langkah **UMKM** dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Oleh Purnama Kusumaastuti, Ega Maharani Asih, dan Carmidah. Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas bahwa UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi di daerah Kabupaten Banyumas pasalnya tidak sedikit masyarakat yang bergelut di dunia bisnnis UMKM. UMKM banyak diminati oleh Kabupaten Banyumas karena dapat didirikan dengan modal yang relatif kecil. Akan tetapi permasalahan UMKM sebagai basis pembangunan daerah masih terdapat masalah salah satunya masalah kualitas Sumber Daya Manusia, Perizinan dan Tempat Usaha, Masalah Permodalan. Peneliti mengemukakan langkah strategis UMKM dalam menghadapi mea yaitu dengan meningkatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan penggunaan teknologi, penguaan daya saing, dan yang lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini meningkatkan kerjasama antara UMKM dan pemerintah untuk memperkuat jaringan dalam menghadapi persaingan MEA.

Adanya beberapa persamaan dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadikan suatu gambaran awal terhadap penelitian yang akan dilakukan mengenai Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Tetapi walaupun memiliki kesamaan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menghadapi MEA serta penguatan UMKM untuk menghadapi MEA. Objek penelitian memiliki perbedaan karena dalam penelitian ini penulis memilih "Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam Menghadapi Ekonomi ASEAN" selain itu perbedaan dari pemilihan lokasi penelitian yang akan timbul kemungkinan perbedaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1.

Perbandingan Penelitian-Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian
Yang Sedang Dilakukan

NO	Nama	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Chairul Shaleh, Kebijakan dan Strategi Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.	Penelitian yang menggunakan metode Kualitatif	Perlindungan terhadap tenaga kerja lokal untuk tetap bisa bersaing dengan tenaga asing khususnya dalam MEA.	Fokus dan lokus penelitiannya berbeda. Pada penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis memilih fokus pada bagaimana strategi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penguatan UMKM untuk menghadapi MEA.
2.	Putri Tiara Kasih (2014- 2015) Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN	Metode Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif	UMKM merupakan jenis usaha yang memberi keuntungan yang banyak bagi pemerintah Provinsi Riau, dan dapat memberikan peluang bagi MEA.	Fokus penelitian serta lokasi penelitian berbeda. Penelitian ini berada di Riau, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan di Kabupaten Garut.

	(MEA) Terhadap			
	Sektor Kerajinan			
3.	Oleh Benazir	Pendekatan	Perlunya Kabupaten di	Lokasi Penelitian,
	Bona	deskriptif	Jawa Barat untuk	objek penelitian, dan fokus
	Pratamawaty,	dengan metode	mengeluarkan kebijakan komunikasi politik	penelitian
	Evie Ariadne,	studi kasus.	dalam mensosialisasikan	
	dan Putri		pemberlakuan MEA.	
	Trulline.			
	(2019).			
	Strategi			
	Komunikasi			
	Politik dalam			
	Sosialisasi			
	Kebijakan			
	Masyarakat			
	Ekonomi			
	ASEAN di			
	Bandung Barat			
4.	Purnama Kusumaastuti, Ega Maharani Asih, dan Carmidah. (2015). Strategi dan Langkah- Langkah UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).	Metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini meningkatkan kerjasama antara UMKM dan pemerintah untuk memperkuat jaringan dalam menghadapi persaingan MEA.	Fokus penelitiannya berbeda. Penelitian ini membahas tentang strategi UMKM dalam menghadapi MEA. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah strategi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penguatan UMKM untuk menghadapi MEA.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah menjelaskan alasan-alasan yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam Penguatan UMKM untuk Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang merupakan anggota dari masyarakat ekonomi ASEAN. MEA berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Garut sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempersiapkan strategi dalam menghadapi MEA agar mampu bersaing di pasar global. Dengan kondisi sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan baik dalam segi pendidikan, sosial, ekonomi, maupun politik menjadi salah satu tantangan besar bagi Garut khususnya pemerintah daerah. Karena persiapan tersebut bukan hanya di persiapkan oleh pemerintah pusat namun menjadi salah satu tugas dari pemerintah daerah salah satunya Kabupaten Garut. Karena Garut mempunyai banyak potensi untuk memberikan kontribusi terhadap Indonesia dalam hal perekonomian. Potensi yang paling menarik yaitu produk komoditas lokalnya yang dihasilkan UMKM yaitu ada 7 komoditas unggulan seperti akar wangi, dodol Garut, Batik Garutan, Kopi Sunda hejo, Kerajinan Kulit, Jeruk dan domba Garut. Menjadi potensi unggulan yang dapat bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah agenda regional yang telah menjadi komitmen nasional dan agenda MEA tidak akan berjalan baik jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Garut merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi dalam perekonomian di Indonesia. Dari sumber daya alamnya yang melimpah, menjadikan Garut salah satu daerah yang berpotensi terutama dalam bidang pertanian.

Kondisi permasalahan yang dimiliki, membuat masyarakat Garut tidak semuanya memahami dan peduli terhadap adanya pasar global dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini menjadikan pemerintah daerah harus mempunyai strategi yang tepat agar mampu berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Karena untuk mencapai MEA ini harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah, dengan masyarakat. Terlebih wilayah Kabupaten Garut yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan.

Dalam tinjauan pustaka, peneliti membahas teori mengenai Integrasi ekonomi politik sebagai hubungan yang kuat bahwa kesuksesan ekonomi merupakan kesuksesan dari kebijakan politik termasuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN ini. kemudian beberapa teori yang lainnya diharapkan mampu menjadi referensi dalam rangka melakukan penelitian ini. pengertian-pengertian yang ada di tinjauan pustaka diharapkan mampu menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Teori Integrasi politik, dan teori pembangunan ekonomi lokal merupakan teori yang di gunakan dalam penelitian ini. Teori integrasi politik berhubungan dengan adanya koordinasi kebijakan ekonomi yang memerlukan keputusan politik di antara negara yang berpartisipasi. kemudian ASEAN telah

mendeklarasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai tujuan akhir dari integrasi ekonomi regional ASEAN. selain itu, teori pembangunan ekonomi lokal memberikan kesinambungan bahwa untuk mencapai ekonomi Indonesia memerlukan peran dari ekonomi lokal. Bagaimana pemerintah daerah membuat strategi agar dapat mengikuti masyarakat ekonomi ASEAN ini.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan agar dapat menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dan utuh dari individu, lembaga, atau situasi tertentu yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. yang berfokus pada strategi pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam penguatan UMKM untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini ialah mengetahui tantangan dan kendala apa saja yang masih menjadi hambatan pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian apa saja potensi atau peluang yang dimiliki Kabupaten Garut dalam mendukung pemerintah daerah dalam membuat strategi atau kebijakan dalam mempersiapkan Garut ikut serta dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

LATAR BELAKANG

- 1. Garut memiliki produk komoditas unggulan dari UMKM yang dapat bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN.
- 2. Sulitnya UMKM dalam membuat peluang baru, dan kurangnya penguasaan terhadap teknologi.
- 3. Adanya persoalan MEA bukan hanya memberikan peluang tapi juga tantangan bagi UMKM di Kabupaten Garut.
- 4. UMKM masih kekurangan kualitas sumber daya manusia, dan masih sulit dalam mengekspor produknya.

RUMUSAN MASALAH Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam Penguatan UMKM untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ? Teori: 1. Integrasi Ekonomi Politik 2. Konsepsi Pembangunan Ekonomi Lokal Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Mengetahui bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Garut dalam Penguatan UMKM untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan peluang dan tantangan yang dimiliki, sehingga Garut dapat berkontribusi untuk mengikuti Masyarakat Ekonomi ASEAN.